

PRAKTEK NEGOSIASI IDENTITAS KULTURAL PADA PELAKU PERNIKAHAN ANTAR BANGSA

FATMA DIAN PRATIWI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ABSTRAK

Fokus dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana pasangan dari berbagai bangsa dan budaya membentuk identitas dalam pernikahan mereka. Pasangannya berasal dari Indonesia (Jawa) dan Jepang. Menggunakan metode Qualitative Deskriptif, Identitas dalam penelitian ini dilihat dalam konteks identitas budaya. Kemudian dianalisis melalui proses Negosiasi Identitas yang berhubungan dengan Kompetensi Budaya yaitu Pengetahuan Identitas, Perhatian, dan Keterampilan Negosiasi terutama mengenai nilai budaya dalam kehidupan, kebenaran kerja dan etos kerja, hubungan antara manusia dan alam, persepsi tentang waktu, dan hubungan antar manusia. Hasilnya menunjukkan, bahwa pasangan dengan budaya dan bangsa yang berbeda, Jawa dan Jepang, membentuk identitas pernikahan mereka sebagai identitas Jawa-Jepang.

Kata Kunci: *Negosiasi Identitas, Kompetensi Budaya, Pasangan dengan berbagai bangsa dan budaya, Jawa, Jepang*

Pendahuluan

Dalam Islam, pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara sepasang anak manusia, lelaki dan perempuan. Mereka disatukan oleh sebuah janji suci di depan Tuhan untuk membangun sebuah keluarga dan melestarikan keturunan berupa anak-anak manusia yang akan lahir dari rahim ibunya. Begitu sakralnya ikatan pernikahan ini hingga Rasulullah menetapkan ikatan ini sebanding dengan separuh agama. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي

“Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi”

Akan tetapi pada perjalanannya, proses penyatuan dua anak manusia ini sering mengalami kendala. Dengan adanya perbedaan latar belakang biologis, demografis, keyakinan hingga budaya. Pada akhirnya, perbedaan-perbedaan ini dapat berujung pada keretakan hubungan pernikahan yang telah terjalin. Bukan tidak mungkin berujung pada perceraian.

Merujuk pada pemberitaan tentang meningkatnya angka perceraian di Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama (Kemenag) menyebutkan, angka perceraian di Indonesia lima tahun terakhir terus

meningkat. Pada 2010-2014, dari sekitar 2 juta pasangan menikah, 15 persen di antaranya bercerai. Angka perceraian yang diputus pengadilan tinggi agama seluruh Indonesia tahun 2014 mencapai 382.231, naik sekitar 100.000 kasus dibandingkan dengan pada 2010 sebanyak 251.208 kasus

(<http://health.kompas.com/read/2015/06/30/151500123/Kasus.Perceraian.Meningkat.70.Persen.Diajukan.Istri>).

Penyebab terbanyak adalah kehidupan keluarga yang tidak harmonis, lebih lanjut dibahas oleh Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sudibyo Aliemuso mengatakan ada tiga hal yang melatarbelakangi perceraian, yakni faktor ekonomi, psikologi dan ketiadaan ruang pengaduan masalah keluarga. Faktor ekonomi terkait erat dengan kesiapan calon pengantin untuk bertanggung jawab secara ekonomis. Sementara faktor psikologi berhubungan dengan kematangan atau kesiapan mental calon pengantin mengarungi rumah tangga (<http://health.kompas.com/read/2015/06/30/151500123/Kasus.Perceraian.Meningkat.70.Persen.Diajukan.Istri>).

Lalu bagaimana dengan pernikahan antar bangsa, yang notabene berbeda latar belakang budaya. Kemungkinan untuk terjadi adanya ketidakharmonisan akan sangat besar mengingat adanya perbedaan budaya diantara keduanya. Deddy Mulyana (2005 : 20) memaparkan bahwa “budaya pada hakikatnya bertanggung jawab atas seluruh perbendaharaan perilaku komunikatif dan makna yang dimiliki setiap orang. Bahkan pada akibatnya, perbendaharaan-perbendaharaan yang dimiliki dua orang yang berbeda budaya pada akhirnya akan berbeda pula, yang kemudian dapat menimbulkan segala macam bentuk kesulitan.”

PEMBAHASAN

Secara historis, sejak dahulu kajian mengenai pernikahan yang dilakukan manusia-manusia dengan latar belakang budaya berbeda telah menjadi isu yang bertahan lama (*long-lasting*) dalam ranah penelitian ilmu sosial. Sejak zaman dahulu, manusia telah mengenal istilah eksogami yang berarti suatu perkawinan antar etnis. Selanjutnya, di saat bangsa Eropa (kulit putih, *pen*) mulai menjelajah dunia dan bertemu dengan bangsa lain kemudian banyak terjadi perkawinan antara mereka, mulai dikenal istilah *intermarriage* (*interracial marriage*). Kata “*interracial*” berarti perbedaan ras sedangkan *marriage* berarti perkawinan. Pada masa tersebut, istilah *interracial marriage* merujuk pada perkawinan antara bangsa Eropa dan Amerika yang berkulit putih dengan bangsa Afrika dan Indian yang berkulit hitam dan merah.

Di Indonesia sendiri, keberagaman bentuk dan latar belakang kawin campur kini dapat dengan mudah ditemui di masyarakat. Pada kisaran tahun 1980-an hingga tahun 1990-

an, di sisi lain Indonesia misalnya Jakarta, terjadi tren “*macarin bule*” dan “*ngawinin bule*”. Banyak perempuan asli Indonesia di Jakarta yang akhirnya menikah dengan *bule* yang mereka temui di perusahaan tempat kerjanya, yang sering disebut dengan istilah ekspatriat. Kondisi ini dimungkinkan terjadi karena banyak perusahaan-perusahaan asing yang berkantor pusat di manca negara, membuka cabangnya di kota-kota besar semacam Jakarta. Saat itu ekspatriat menjadi semacam idaman untuk dijadikan pasangan hidup karena citra mereka yang identik dengan kemewahan dan sekaligus gen yang mengalir di tubuh mereka diyakini dapat digunakan untuk memperbaiki keturunan. Dengan tampilan fisik tinggi badan melebihi ras asia, ramping, berkulit putih dan bergaji *dollar* merupakan karakteristik ekspatriat pada masa itu.

Seperti halnya pasangan yang akan menjadi obyek penelitian ini, istri berasal dari Yogyakarta, sedangkan suami dari Osaka, Jepang. Mereka bertemu di Jakarta saat sang istri sedang bertugas menjadi Pembawa Acara, di sebuah acara yang kebetulan dihadiri oleh kantor cabang sang suami. Saat ini sang istri masih tercatat sebagai mahasiswi program studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga (pada saat menjadi obyek penelitian). Dan sesekali bertugas sebagai pembawa acara lepas di berbagai acara. Dari pertemuan pertama berlanjut berakhir di pelaminan, karena sang suami merasa memiliki ketertarikan pada sang istri.

Sejak menikah, mereka belum pernah tinggal bersama dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini disebabkan oleh adanya keputusan yang diambil meliputi, bahwa sang istri harus menyelesaikan studinya di Jogjakarta, sambil mengasuh anak hasil pernikahan yang saat ini berusia 4 tahun. (selama ini masih tinggal bersama keluarga besarnya di Jogja). Sang suami tetap melanjutkan pekerjaannya di Osaka, Jepang dan tidak bisa sering datang ke Indonesia karena jatah cuti yang sangat minim. Hingga saat ini, komunikasi yang dilakukan oleh keduanya lebih sering dilakukan jarak jauh menggunakan *skype* atau *videocall*.

Keadaan semacam ini tidak kemudian membuat mereka menyerah. Mereka memiliki tujuan yang akan diraih dalam hidup berkeluarga. Maka demi menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, meski tidak tinggal bersama dalam satu rumah, dan yang lebih mendasar lagi, tidak berasal dari bangsa dan budaya yang sama, maka pasangan suami istri ini harus melakukan apa yang disebut dengan negosiasi identitas dan lebih spesifik pada identitas kultural diri masing-masing.

Berbicara mengenai identitas, tidak akan lepas dari budaya. Hal tersebut ditegaskan oleh definisi dari Littlejohn & Foss yang menjelaskan bahwa “*identity is defined as the cultural...*” (2009, p.492). Larry A.Samovar (2004) menjelaskan bahwa ada “lima elemen

terpenting dari budaya, yakni *history* (sejarah), *religion* (kepercayaan), *values* (nilai-nilai), *social organization* (organisasi sosial), dan *language* (bahasa).

Untuk itu, dalam menggali fenomena pasangan suami istri berbeda budaya yang membentuk identitas dalam sebuah ikatan pernikahan, peneliti menggunakan metode studi kasus. “Studi kasus bukan merupakan suatu metode ilmiah yang spesifik, melainkan lebih merupakan suatu metode yang lazim diterapkan untuk memberikan penekanan pada spesifikasi dari unit-unit kasus yang diteliti” (Pawito, 2007, p.140-141). Adapun dengan menggunakan metode studi kasus, maka perumusan masalah dari peneliti yakni bagaimana para pelaku pernikahan antar bangsa ini melakukan praktek negosiasi identitas kultural mereka?

A. Identity Negotiation Theory

Pendekatan Identity Negotiation menekankan pada keterkaitan antara nilai-nilai kultural dan konsepsi diri. Menjelaskan bagaimana konsepsi seseorang memengaruhi kognisi, emosi dan interaksi seseorang. Hal ini menjelaskan pula, mengapa dan bagaimana orang menggambarkan batas intergroup.

Stella Ting Toomey memaparkan bahwa identitas hakikatnya dinegosiasikan khususnya pada dua atau lebih budaya yang berbeda (Littlejohn&Foss, 2009 p. 90). Ting Toomey selanjutnya mengatakan bahwa ada dua hal untuk mencapai kenyamanan yang seimbang dalam *Identity Negotiation*:

Pertama, Ting Toomey menyebutnya sebagai *functional biculturalism*, merupakan situasi seseorang dapat mengatur pengertian dari diri dengan kuat, tetapi mampu juga untuk mengeksplor identitas orang lain dan menghargainya. Kedua, *cultural transformer* dimana seseorang mampu untuk mengubah satu konteks budaya ke budaya lainnya dengan mudah dan hati-hati. Kunci untuk mencapai dua kenyamanan tersebut yakni melalui *intercultural competence* (kompetensi interkultural) yang terdiri dari tiga komponen yakni *Identity Knowledge*, *Mindfulness*, dan *Negotiation Skill*” (Littlejohn & Foss, 2009, p.91).

“*Identity knowledge* merupakan situasi dimana adanya pengetahuan bahwa pentingnya sebuah identitas budaya atau etnik dan kemampuan untuk melihat apa yang dianggap penting oleh orang lain. Hal ini berarti perlu mengetahui identitas budaya dan mampu untuk melihat perbedaan” (Littlejohn & Foss, 2009, p.91).

Sedangkan “*Mindfulness* berarti menjadi terbiasa dan sadar secara sungguh-sungguh. Hal tersebut berarti siap untuk berubah menuju perspektif yang baru” (Littlejohn & Foss, 2009, p.91). komponen terakhir, adalah *Negotiation Skill*, yang bermakna, kemampuan untuk menegosiasi identitas melalui observasi yang berhati-hati, mendengarkan, memiliki rasa empati, kepekaan komunikasi non verbal, kesopanan, menyusun kembali, dan berkolaborasi” (Littlejohn & Foss, 2009, p.91).

Menurut Alvino E. Fantini, (Brattleboro, VT, USA 1995; Revised 2001), topik mengenai Kompetensi Interkultural menjadi semakin penting sepanjang tahun terakhir : adanya globalisasi dan kontak mendunia antara perusahaan, organisasi dan individual, yang membutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dan sukses. Kebutuhan dasarnya adalah sensitivitas dan kesadaran diri : memahami perilaku orang lain dan cara berfikir sebagaimana kemampuan untuk mengekspresikan cara pandang seseorang dalam kondisi yang transparan. Tujuannya adalah untuk dipahami dan dihormati dengan tetap meyakini apa yang menjadi pendapatnya sefleksibel mungkin.

A. Latar Belakang Budaya Jawa dan Jepang

Kebudayaan Jawa yang di maksud di sini adalah kebudayaan yang di anut oleh masyarakat Jawa yang hidup di Kota Surakarta, dengan sentralnya berada pada keraton Yogyakarta dan keraton Surakarta.

Untuk membicarakan sistem nilai budaya antara kebudayaan Jawa dan Jepang, akan digunakan kerangka kajian yang pernah dikembangkan oleh Kluckhohn (dalam Koentjaraningrat, 1984: 435) (dalam Soelaeman, 2001: 42), yang secara universal membagi nilai-nilai budaya dari semua bangsa di dunia ke dalam lima kategori berdasarkan lima masalah universal terpenting di dalam kehidupan kelompok manusia, yaitu (1) masalah hakekat hidup; (2) masalah mengenai hakekat dari kerja serta usaha manusia; (3) masalah mengenai hubungan antara manusia dan alam; (4) masalah persepsi manusia tentang waktu; dan (5) masalah mengenai hubungan antara manusia dan sesamanya.

Dengan membandingkan kedua sistem nilai budaya Jawa dan Jepang, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakekat hidup

Ada perbedaan yang cukup signifikan dalam cara orang Jawa dan Jepang dalam memaknai hakekat hidup. Jika orang Jawa memandang bahwa hidup penuh dengan kesengsaraan, maka orang Jepang tidak demikian. Meskipun hasil akhirnya sama-sama memunculkan sikap optimis, akan tetapi orang Jepang lebih pada adanya sikap realistik yang tentu saja tidak hanya pada kondisi sengsara saja, akan tetapi pada kondisi umum.

2. Hakekat karya dan etos kerja

Ada perbedaan anggapan mengenai etos kerja di antara kedua sistem budaya ini. Pada kultur Jawa hampir tidak ada motivasi yang kuat untuk bekerja. Mereka bekerja sekedar untuk dapat hidup, mereka lebih suka mengosongkan hidup ini untuk menanti hidupnya di dunia akhirat kelak. Sedangkan pada budaya Jepang, meskipun kehidupan di dunia akhirat pada akhirnya juga akan dikejar, tetapi disertai dengan motivasi kuat untuk bekerja. Mereka bekerja untuk bakti dan menjaga nama baik orang tua serta menunjukkan kesetiannya kepada keluarga, agar kebahagiaan di akhirat dapat dicapai.

3. Hubungan antara manusia dengan alam

Keduanya sama-sama berusaha untuk hidup selaras dengan alam, yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan alam makro kosmos dan dunia religio-magi.

4. Persepsi mengenai waktu

Keduanya sama-sama mempunyai orientasi waktu masa kini dan masa lalu, tetapi terdapat perbedaan persepsi mengenai waktu di antara keduanya. Kultur Jepang cenderung M-Time atau *Monochronic Time*, seperti dijelaskan diatas. Sementara orang Jawa yang masuk ke dalam bagian Indonesia memiliki *Polycronic Time* (P-Time), yaitu dapat mengerjakan lebih dari satu kegiatan dalam satu waktu dan lebih mementingkan hubungan kemanusiaannya. Sementara orang Jepang sebaliknya.

4. Hubungan antara manusia dan sesama

Keduanya memiliki nilai suka tolong menolong dan solidaritas yang tinggi pada sistem kekerabatan. Hanya bedanya, pada kultur Jepang penekanan kepentingan keluarga lebih utama daripada individu dan masyarakat. sedangkan pada kultur Jawa hubungan antara individu, keluarga dan masyarakat cukup seimbang. Hal ini tampak pada kultur Jawa yang cenderung *conform* dengan masyarakat, serta dikembangkan sikap solidaritas di antara para anggota suatu kelompok masyarakat

B. Analisis dan Interpretasi Negosiasi Identitas pada pelaku pernikahan antar bangsa

Pendekatan *Identity Negotiation* menekankan pada keterkaitan antara nilai-nilai kultural dan konsepsi diri. Menjelaskan bagaimana konsepsi seseorang memengaruhi kognisi, emosi dan interaksi seseorang. Hal ini menjelaskan pula, mengapa dan bagaimana orang menggambarkan batas intergroup.

Stella Ting Toomey memaparkan bahwa identitas hakikatnya dinegosiasikan khususnya pada dua atau lebih budaya yang berbeda (Littlejohn & Foss, 2009 p. 90). Ting Toomey selanjutnya mengatakan bahwa ada dua hal untuk mencapai kenyamanan yang seimbang dalam *Identity Negotiation*:

Pertama, Ting Toomey menyebutnya sebagai *functional biculturalism*, merupakan situasi seseorang dapat mengatur pengertian dari diri dengan kuat, tetapi mampu juga untuk mengeksplor identitas orang lain dan menghargainya. Kedua, *cultural transformer* dimana seseorang mampu untuk mengubah satu konteks budaya ke budaya lainnya dengan mudah dan hati-hati. Kunci untuk mencapai dua kenyamanan tersebut yakni melalui *intercultural competence* (kompetensi interkultural) yang terdiri dari tiga komponen yakni *Identity Knowledge, Mindfulness, dan Negotiation Skill*” (Littlejohn & Foss, 2009, p.91).

“*Identity knowledge* merupakan situasi dimana adanya pengetahuan bahwa pentingnya sebuah identitas budaya atau etnik dan kemampuan untuk melihat apa yang dianggap penting oleh orang lain. Hal ini berarti perlu mengetahui identitas budaya dan mampu untuk melihat perbedaan” (Littlejohn & Foss, 2009, p.91).

Sedangkan “*Mindfulness* berarti menjadi terbiasa dan sadar secara sungguh-sungguh. Hal tersebut berarti siap untuk berubah menuju perspektif yang baru” (Littlejohn & Foss, 2009, p.91). Komponen terakhir, adalah *Negotiation Skill*, yang bermakna, kemampuan untuk menegosiasi identitas melalui observasi yang berhati-hati, mendengarkan, memiliki rasa empati, kepekaan komunikasi non verbal, kesopanan, menyusun kembali, dan berkolaborasi” (Littlejohn & Foss, 2009, p.91).

Komponen Identitas pertama yang akan di bahas adalah dari aspek kata-kata yang diucapkan sehari-hari yang merupakan identitas dalam konteks komunikasi. Identitas dari aspek *language* (bahasa) merupakan identitas dalam konteks budaya.

Namun, karena keduanya memiliki persamaan tujuan dan makna, maka peneliti menyatukannya. “Bahasa merupakan sarana untuk membuat anggota budaya tersebut dapat berbagi ide-ide, perasaan, dan informasi. Di samping itu, bahasa juga merupakan metode utama untuk mentransmisikan budaya” (Samovar, 2004, p.31-32). Dalam hal aspek kata-kata yang diucapkan sehari-hari atau bahasa yang digunakan, SY dan RW mengakui bahwa ketika saling berkomunikasi, bahasa yang paling sering digunakan adalah bahasa Inggris. Sebagai pasangan *primary relationship* berbeda budaya, bahasa Internasional seperti bahasa Inggris sangat membantu dalam proses komunikasi antara mereka berdua. Bagi RW, hal tersebut dikarenakan satu sama lainnya tidak perlu lagi mempelajari bahasa dari budaya pasangannya. Ratna mengakui bahwa frekuensi keduanya yang jarang berkumpul dengan keluarga besar masing-masing anggota pasangan dijadikan sebagai alasan mengapa SY dan RW tidak menggunakan bahasa asli masing-masing saat berkomunikasi.

Identitas dari aspek *history* (sejarah) merupakan identitas dalam konteks budaya. “Setiap budaya percaya bahwa sejarah merupakan sebuah panduan yang penting untuk menuntun ke masa depan dimana sejarah tersebut dilestarikan dari generasi ke generasi. Ceritera sejarah tersebut sejatinya mampu menumbuhkan identitas budaya aslinya sendiri” (Samovar, 2004, p.31-32). Dalam hal aspek *history* (sejarah), Jepang pernah menjajah Indonesia selama 3,5 tahun antara tahun 1942 – 1945. Tapi kondisi sejarah yang demikian ini tidak kemudian membuatnya menjadi hal yang sangat penting. Keduanya tetap menikah meskipun Jepang pernah dikenang sebagai bangsa yang kejam saat menjajah Indonesia. Salah satu yang paling diingat adalah keberadaan *Romusha*, orang Indonesia yang dijadikan sebagai pekerja dan diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh Jepang saat itu. Hingga kini masih banyak eks romusha korban PD II mengajukan klaim agar Jepang membayar kompensasi gaji mereka yang tidak dibayar selama jadi romusha. RW tidak memperlakukan kewarganegaraan suaminya yang masuk kategori ‘bekas penjajah’ dengan cara menerima pinangannya dan tidak pernah membahas hal ini meskipun sedikit.

Identitas dari aspek *religion* merupakan identitas dalam konteks budaya. “Setiap budaya memiliki kepercayaan dan aktivitas ritual (upacara, tata cara, larangan-larangan) yang menonjol. Pengaruh dari *religion* dapat dilihat dari struktur budayanya” (Samovar, 2004, p.31). Dalam aspek *religion*, SY dan RW sama-sama memeluk agama Islam. Latar belakang Ibunda RW yang muallaf ikut memberikan kontribusi pada RW saat menerima pinangan SY, untuk tidak memperlakukan keislaman SY yang didapatkan tidak dari semasa kecil.

“Identitas dari aspek *social organization* (struktur sosial, sistem sosial) merupakan identitas dalam konteks budaya. Identitas dari aspek *social organization* dapat dilihat dari unit-unit sosial yang terkandung dalam suatu budaya, salah satunya adalah bagaimana pasangan melakukan suatu proses upacara pernikahan (Samovar, 2004, p.31).” SY dan RW melangsungkan pernikahan secara sederhana menggunakan syariat Islam, yaitu dengan mengucapkan Ijab Qabul di depan penghulu dan saksi-saksi. Hal ini selain untuk meminimalkan potensi konflik karena pemilihan adat budaya siapa yang dipilih, juga karena unsur kepraktisan dan ekonomis.

Identitas dari aspek *values* (nilai-nilai) merupakan identitas dalam konteks budaya. Setiap budaya memiliki *values* yang tidak dapat disamaratakan. “*Values are shared ideas about what is true, right, and beautiful that underlie cultural patterns and guide society in response to the physical and social environment.*” (Samovar, 2004, p.48). Untuk aspek nilai budaya ini akan digunakan aspek nilai budaya menurut Koentjaraningrat yaitu hakekat hidup, hakekat karya dan etos kerja, hubungan manusia dengan alam, persepsi mengenai waktu dan hubungan antara manusia dengan sesamanya.

Dalam proses membentuk identitas antara SY dan RW yang termasuk dalam *identity knowledge* dari hubungan *primary relationship* tersebut adalah ketika melakukan negosiasi identitas dalam aspek hubungan antara manusia dengan sesamanya. RW mengakui bahwa SY masih menjalankan tradisi kumpul-kumpul dengan temannya sambil minum sake (arak/minuman keras hasil fermentasi beras, pen). Sementara dalam ajaran Islam yang dianut keduanya, minuman keras atau dalam bahasa arabnya *khamr* adalah termasuk yang diharamkan dalam Islam. Seperti firman Allah yang tertuang dalam Al Quran, “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al Maidah :90.*

Begitu pula dalam Al Quran surat Al Baqarah : 219), “Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah : “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu yang mereka nafkahkan. Katakanlah : “Yang lebih dari keperluan.”

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (QS.Al Baqarah : 219).

RW yang berbudaya Jawa dan dalam konteks ini, beragama Islam, menyadari bahwa ketika menikah dengan orang berbeda budaya harus bisa menerima konsekuensi untuk menghormati budaya pasangannya. Hal tersebut dilakukan RW dengan tidak memperingatkan secara keras perilaku SY meminum sake ini, “Dia (SY) tahu bahwa minum Sake diharamkan dalam Islam karena termasuk minuman keras. Tapi dia bilang sama saya, untuk yang satu ini (berkumpul bersama teman minum sake, pen) saya belum bisa meninggalkannya karena ini termasuk ke dalam tradisi budaya saya (Jepang). Akhirnya saya mendingkan saja karena saya memang tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegahnya (RW istri SY, Wawancara Pribadi, 12 November 2016).

Berkaitan dengan tradisi, orang Jepang sering mengadakan acara minum-minum bersama rekan kerja, menurut Dr. Yoshihito Naito, seorang psikolog mengatakan “Di luar negeri, orang-orang sering mengundang tamu ke rumah mereka untuk menghadiri pesta rumah. Orang Jepang tidak terbiasa mengundang dan diundang ke rumah sehingga sebagai ganti rumah, mereka mengajak rekannya yang lebih muda ke restoran izakaya (tempat minum sake) favorit mereka. Di restoran izakaya favorit itu kadang-kadang disimpan botol minuman mereka, dan bagi orang Jepang, tempat minum kesukaan mereka merupakan ruang-semu seperti rumah, seperti halnya mereka memanggil wanita yang melayani tamu di bar snack atau klub dengan panggilan “mama”. Jadi, orang Jepang berfikir, minum sake bersama merupakan ritual penting agar bisa rukun, terutama antar rekan kerja. (dikutip dari laman Culturezine di www.okwave.com, diunduh pada Kamis, 26 Januari 2016).

Berkaitan dengan mindfulness sebagai komponen kompetensi kultural yang harus dimiliki, SY dan RW memiliki perbedaan yang cukup signifikan berkaitan dengan aspek persepsi mengenai waktu. SY sebagai orang Jepang lebih *strict*, sementara RW lebih *fleksibel*. Tidak jarang, keduanya sempat berselisih atau bersitegang karena perbedaan karakter/ pembawaan ini. Keduanya sama-sama mempunyai orientasi waktu masa kini dan masa lalu, tetapi terdapat perbedaan persepsi mengenai waktu di antara keduanya. SY yang memiliki kultur Jepang cenderung berpandangan M-Time atau *Monochronic Time*. Dalam kesehariannya, dia sebagaimana orang Jepang pada umumnya, memandang dengan memberikan nilai tinggi terhadap waktu. Mereka tidak pernah meleset, dapat mewujudkan apa yang direncanakan. Menurut Edward T. Hall, orang Jepang termasuk ke dalam kategori Monochronic Time (M-Time). Biasa mengerjakan kegiatan tunggal dalam satu waktu, dikerjakan dengan runtut sesuai tahapan, dengan begitu hasilnya sangat berkualitas tinggi.

Sementara orang Jawa yang masuk ke dalam bagian Indonesia memiliki *Polycronic Time* (P-Time), yaitu dapat mengerjakan lebih dari satu kegiatan dalam satu waktu dan lebih mementingkan hubungan kemanusiaannya. Sementara orang Jepang sebaliknya.

Begitu pula yang terjadi pasangan ini. Pada saat itu SY telah mengagendakan kunjungan RW ke Osaka pada saat Jepang sedang memasuki libur musim dingin. Segala hal telah dipersiapkan, dari tiket pergi dan pulang, keperluan akomodasi selama di Osaka, jadwal perjalanan selama di sana termasuk tempat-tempat yang akan dikunjungi. Akan tetapi, menjelang hari – H keberangkatan, RW memeriksakan diri ke dokter dan dinyatakan positif hamil. Saat mengatakan pada SY bahwa, keberangkatan ke Osaka sebaiknya ditunda, SY sempat emosional dan tidak mau menerima alasan RW (RW sempat tidak menyampaikan secara detil alasan membatalkan keberangkatan karena ingin memberikan kejutan.). SY sempat menyinggung nilai budaya Jawa yang seperti tidak menghargai waktu. Akhirnya RW menyerah dan akhirnya menyebutkan alasan sebenarnya, bahwa program bayi tabung mereka akhirnya berhasil, dan mereka akan memiliki anak, barulah SY dapat menerima kondisi tersebut.

Komponen terakhir, adalah *Negotiation Skill*, yang bermakna, kemampuan untuk menegosiasi identitas melalui observasi yang berhati-hati, mendengarkan, memiliki rasa empati, kepekaan komunikasi non verbal, kesopanan, menyusun kembali, dan berkolaborasi” (Littlejohn & Foss, 2009 : 91). Terutama pada aspek nilai budaya hakekat hidup. Meski terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam cara orang Jawa dan Jepang dalam memaknai hakekat hidup. Jika orang Jawa memandang bahwa hidup penuh dengan kesengsaraan, maka orang Jepang tidak demikian. Meskipun hasil akhirnya sama-sama memunculkan sikap optimis, akan tetapi orang Jepang lebih pada adanya sikap realistis yang tentu saja tidak hanya pada kondisi sengsara saja, akan tetapi pada kondisi umum.

Komponen kompetensi ini dilakukan keduanya saat memutuskan untuk menunda berkumpul dalam satu rumah sebagai suami dan istri. Status RW yang masih tercatat sebagai mahasiswa tingkat akhir di salah satu program studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, mengharuskannya untuk tetap fokus dan konsentrasi menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhirnya. Sambil mengasuh anak mereka, RW tinggal bersama keluarga besarnya di Bantul, sehingga terbantu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

SY bersikap realistis, dan mengesampingkan keinginannya untuk hidup ditemani anak dan istrinya di Osaka, karena untuk RW, menyelesaikan studi saat ini menjadi prioritas yang jauh lebih penting. RW sempat melontarkan bahwa SY boleh berselingkuh dengan wanita lain, karena merasa ini adalah kesalahannya tidak mengikuti keberadaan suami. Oleh SY kebolehan ini tidak kemudian dituruti karena dia masih menjunjung komitmen berdua untuk menikah hingga kelak maut memisahkan. Hingga akhirnya, SY sering bersikap

terbuka dengan selalu menceritakan kepada RW, setiap ada teman perempuannya yang cantik bersikap lebih non formal kepada SY.

PENUTUP

Dari hasil wawancara dan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap nara sumber, bahwa *primary relationship* berbeda budaya antara budaya Jawa dan Jepang membentuk identitas pernikahan mereka menjadi identitas Jawa-Jepang. Peneliti melihat bahwa antara SY dan RW masih membawa budaya mereka masing-masing ke dalam hubungan pernikahan mereka. Dalam aspek nilai budaya yaitu hakekat hidup, hakekat karya dan etos kerja, hubungan manusia dengan alam, persepsi mengenai waktu dan hubungan antara manusia dengan sesamanya, mereka telah mengoptimalkan kompetensi kultural mereka dalam bentuk *Identity Knowledge*, *Mindfulness* dan *Negotiation Skill*.

Dari hasil analisis yang dimulai pada tahap proses munculnya identitas Jawa dan Jepang, lalu identitas dua budaya tersebut dinegosiasikan, kemudian identitas tersebut dikembangkan dan dibentuk, maka peneliti dapat menjawab dari perumusan masalah peneliti, yakni pasangan suami istri (*primary relationship*) berbeda bangsa dan budaya antara budaya Jawa dan Jepang membentuk identitas dalam sebuah ikatan pernikahan dengan menggunakan budaya Jawa-Jepang sebagai identitas pernikahan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran

DeVito, Joseph A. *The Interpersonal Communication Book (Ninth Edition)*. New York: Addison Wesley Longman, Inc., 2001.

Dodd, Carley H. *Dynamics of Intercultural Communication (Fifth Edition)*. USA: The McGraw-Hill Companies, Inc., 1998.

Hariyono, P. *Kultur Cina dan Jawa: Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Liliweri, Alo. *Dasar-dasar Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Littlejohn, S.W. & Foss, K.A. (2008). *Theories of human communication*. Sage Publications, California, USA.

_____ (2009). *Encyclopedia of communication theory*. Sage Publications, California, USA.

Littlejohn, S.W. & Foss, K.A. (2009). *Theories of human communication : ninth edition*. Thomson Wadsworth, USA.

Lustig, Myron, dan Jolene Koester. *Intercultural Competence, Interpersonal Communication Across Cultures (Fourth Edition)*. USA: Allyn & Bacon Pub., 2003.

Martin, Judith N., & Thomas K. Nakayama. *Intercultural Communication in Contexts (Third Edition)*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc. 2004.

Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
Mulyana, D. (2005). *Komunikasi antarbudaya*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. Indonesia.

Pawito. (2007). *Penelitian komunikasi kualitatif*. LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta. Jawa Tengah.

Rogers, Everett M., dan Thomas M. Steinfatt. *Intercultural Communication*. Illinois: Waveland Press, Inc., 1999.

Romano, Dugan. *Intercultural Marriage, Promises and Pitfalls*. Maine: Intercultural Press, Inc., 1988.

Samovar, L.A & Porter, R.E. (2004). *Communication between cultures* 5th edition. Thomson Learning. USA.

Website

(<http://health.kompas.com/read/2015/06/30/151500123/Kasus.Perceraian.Meningkat.70.Persen.Diajukan.Istri>).

(<http://health.kompas.com/read/2015/06/30/151500123/Kasus.Perceraian.Meningkat.70.Persen.Diajukan.Istri>)